

## RISALAH KEBIJAKAN

# Penguatan GEDSI pada Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam Memperkuat “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”

Arianti Ina Restiani Hunga<sup>1</sup>, Emy Susanti<sup>2</sup>, Keppi Sukesi<sup>3</sup>

## LATAR BELAKANG

Pada September 2015, komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) resmi diadopsi 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Republik Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimandatkan adanya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Salah satu prinsip penting yang menjadi pijakan komitmen global ini adalah “*No One Left Behind*”, yang mensyaratkan inklusivitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya pencapaian SDGs. Di Indonesia, prinsip ini diterjemahkan dalam kemitraan multipihak untuk pencapaian SDGs sehingga semua pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil, perguruan tinggi, filantropis, dan sektor bisnis serta tentunya pemerintah, memiliki peran penting dalam setiap proses upaya pencapaian SDGs.

Prinsip “*No One Left Behind*” juga mencerminkan bahwa tidak boleh lagi ada kelompok marginal yang ditinggalkan. Dalam dokumen SDGs, kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, dan pengungsi, harus dipastikan terlibat dan menjadi subyek dalam upaya pencapaian SDGs. Di sinilah titik pijak pentingnya menggunakan lensa GEDSI (kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial) sebagai perspektif dan arus utama kebijakan.

Risalah kebijakan ini disusun berdasarkan tanggung jawab dan peran penting perguruan tinggi dalam pencapaian SDGs, terutama untuk tujuan dan target yang berkaitan dengan GEDSI, yaitu tujuan empat mengenai pendidikan yang berkualitas, tujuan lima mengenai kesetaraan dan keadilan gender, serta tujuan sepuluh tentang pengurangan ketimpangan.

Oleh karena itu, keterlibatan pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan arus utama GEDSI menjadi sangat penting. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pencapaian GEDSI guna menghasilkan

<sup>1</sup> Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Kristen Satya Wacana, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Brawijaya, Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia

sarjana yang akan mendistribusikan pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang berperspektif GEDSI. Selain menjadi ruang diskusi dan analisis terbuka, peran perguruan tinggi dalam arus utama GEDSI perlu ditingkatkan.

Risalah kebijakan ini menyajikan rekomendasi untuk para pengambil kebijakan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); perguruan tinggi; serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dalam mengarusutamakan GEDSI pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”.

Risalah kebijakan ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengambilan data, antara lain, diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan survei.

## PERMASALAHAN

Meski secara nomenklatur belum ada kebijakan yang secara eksplisit menyebut GEDSI sebagai arus utama pembangunan, sebenarnya Indonesia telah memiliki sejumlah modalitas untuk menggunakan GEDSI sebagai arus utama kebijakan. Selain mengadopsi SDGs, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional, seperti CEDAW (Konvensi Anti-Diskriminasi terhadap Perempuan), CRC (Konvensi Hak Anak), dan CRPD (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas), sehingga komitmen dari implementasi ratifikasi ini semestinya terwujud dalam kebijakan yang menggunakan lensa GEDSI.

Namun, belum ada kemauan politik untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara holistik dan menyeluruh. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang mengkriminalisasi pelaku kekerasan seksual meski kasus kekerasan seksual terus terjadi, termasuk di perguruan tinggi.

Kemendikbudristek merespons situasi tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini menjadi payung kebijakan di lingkungan perguruan tinggi di tengah belum adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Sampai tulisan ini diterbitkan, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan diperkirakan disahkan pada April 2022.

Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam pengarusutamaan GEDSI di perguruan tinggi tampak dari hal-hal di bawah ini.



### DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

1. Terjadi peningkatan jumlah dosen perempuan, tetapi masih di bawah jumlah dosen laki-laki.
2. Terdapat kecenderungan pengelompokan dosen perempuan dalam bidang studi yang diidentifikasi dengan bidang tertentu yang tersegmentasi karena konstruksi gender.
3. Jabatan fungsional yang dipegang laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan, khususnya pada jabatan di atas lektor.
4. Masih terjadi domestifikasi peran perempuan dalam pelayanan administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia.

- 
5. Makin tinggi jabatan struktural makin didominasi laki-laki.
  6. Dosen dan tenaga pendidik fakultas teknik atau ilmu eksakta lain didominasi laki-laki, terutama bidang *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM).
  7. Belum ada kebijakan afirmasi atau kuota bagi penyandang disabilitas dalam penerimaan tenaga kependidikan dan non-kependidikan di perguruan tinggi.
- 



## MAHASISWA

1. Segmentasi pilihan dan orientasi bidang studi mahasiswa masih berbasis stereotipe gender. Mahasiswa fakultas teknik atau ilmu eksakta lain didominasi laki-laki (terutama bidang STEM). Mahasiswa fakultas sosial, humaniora, dan ekonomi didominasi perempuan.
  2. Konstruksi gender melalui pembentukan maskulinitas dan feminitas yang menempatkan laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan mengakibatkan mahasiswa perempuan lebih rentan.
  3. Meski prestasi mahasiswa perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki, belum ada pengakuan yang signifikan atas situasi ini.
  4. Masih terjadi penolakan atau penghambatan terhadap penyandang disabilitas untuk diterima sebagai mahasiswa.
- 



## MANAJEMEN DAN TATA KELOLA

1. Ketersediaan sarana dan prasarana di perguruan tinggi belum semuanya responsif gender, aman bagi perempuan, dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
  2. Proses seleksi dan penempatan jabatan di perguruan tinggi bersifat netral gender, tidak mempertimbangkan masalah, potensi, serta kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.
  3. Perlindungan bagi perempuan dan penyandang disabilitas tidak secara eksplisit disebutkan dalam surat keputusan rektor.
  4. Tata kelola perguruan tinggi masih didominasi laki-laki. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan pimpinan (rektor, dekan).
  5. Belum tersedia data kependidikan terpilah yang berperspektif inklusi disabilitas.
- 



## KURIKULUM

Masih sangat sedikit perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah wajib dan/atau pilihan dalam kurikulum jenjang S-1 yang terkait dengan GEDSI. Isu GEDSI yang masuk mata kuliah wajib/pilihan terintegrasi dalam mata kuliah yang sudah ada, menjadi bagian dari tugas-tugas, dan biasanya ada pada program/fakultas humaniora. Itu pun terbatas pada perguruan tinggi yang memiliki pusat studi wanita/gender/anak/keluarga/disabilitas. Dalam struktur mata kuliah secara keseluruhan, mata kuliah topik GEDSI sebagai mata kuliah mandiri wajib atau pilihan hanya sebanyak satu mata kuliah (tiga satuan kredit semester atau SKS) per program studi atau sekitar dua persen dari keseluruhan SKS yang dikelola pada program studi ilmu-ilmu sosial. GEDSI terintegrasi dalam mata kuliah yang sudah ada, khususnya dalam program studi/fakultas humaniora, yang diperkirakan mencapai 20 persen. GEDSI menjadi pembahasan utama dalam program pascasarjana kajian wanita/gender yang ada di tiga universitas di Indonesia.

---



## PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Sejak 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendorong adanya integrasi aspek gender dan sosial inklusi dalam panduan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meskipun GEDSI sudah masuk panduan hibah Kemendikbudristek, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari (1) kurangnya pengetahuan dan/atau keterampilan dalam mengintegrasikan GEDSI ke dalam proposal setiap skema hibah, (2) terbatasnya jumlah *reviewer* proposal yang ahli GEDSI, dan (3) masih adanya norma dan struktur patriarki.
3. GEDSI belum terintegrasi secara tegas dalam (1) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Prioritas Riset Nasional (PRN) pemerintah Indonesia, (2) Program *Matching Fund* Kedaireka Kemendikbudristek, serta (3) Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan.
4. Belum ada kebijakan tentang klirens etik yang terkait dengan GEDSI dalam penelitian.

## ANALISIS

### A. Analisis Kebijakan

Beberapa kebijakan afirmasi telah dilakukan beberapa perguruan tinggi atas sepengetahuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek, antara lain perspektif GEDSI dalam kurikulum di beberapa program sarjana strata satu (S-1) dan dua (S-2).

#### PROGRAM SARJANA (STRATA SATU)

1. GEDSI menjadi mata kuliah mandiri wajib atau pilihan, khususnya di program studi/fakultas humaniora, dengan nama mata kuliah yang berbeda-beda, seperti gender dan feminis, gender dan hukum, gender dan sastra, sosiologi gender, gender dan teologi, atau gender dan politik. SKS mata kuliah ini berjumlah tiga.
2. GEDSI terintegrasi dalam mata kuliah yang sudah ada dan menjadi satu atau dua topik bahasan dalam mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini bisa ada di aras universitas yang diambil semua mahasiswa atau di aras fakultas/program studi humaniora.
3. Bila tidak bisa diakomodasi seperti di poin 1 dan 2, materi tentang GEDSI dimasukkan ke metode pembelajaran dalam kelas yang biasanya dilakukan dosen yang memiliki perspektif GEDSI. Strategi ini bisa diintegrasikan dosen program studi/fakultas humaniora dan eksakta.
4. Materi tentang GEDSI terintegrasi dalam penugasan, baik penugasan mata kuliah, magang, maupun tugas akhir mahasiswa. Hal ini dilakukan dosen yang sudah memahami pentingnya GEDSI dan menjadikan isu ini bagian dari topik risetnya.

#### PROGRAM MAGISTER (STRATA DUA)

Program Magister Kajian Wanita/Gender di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin:

- a. Kajian gender berbeban 42-46 SKS;
- b. Mata kuliah wajib dan pilihan;
- c. Penelitian tesis;
- d. Dosen terdiri atas lintas disiplin.

## PROGRAM DOKTORAL (STRATA TIGA)

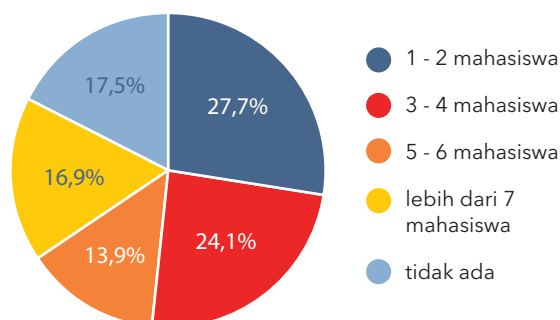
Mata kuliah GEDSI ada di program strata tiga dalam program studi/fakultas humaniora, khususnya yang interdisipliner:

1. Terintegrasi pada mata kuliah wajib;
2. Menjadi mata kuliah pilihan;
3. Terintegrasi dalam metodologi perspektif kritis;
4. Menjadi topik riset.

### B. Analisis Situasi

Analisis ini dilakukan dengan mengambil 166 orang sebagai responden dalam melihat seberapa jauh keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat tentang isu GEDSI selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian yang bertemakan GEDSI. Ada 16,9 persen penelitian yang melibatkan lebih dari tujuh mahasiswa, sedangkan 27,7 persen responden menjawab hanya ada satu-dua mahasiswa yang terlibat. Namun, 17,5 persen responden menjawab sama sekali tidak melibatkan mahasiswa dalam penelitian GEDSI. Hal itu dijelaskan dalam Gambar 1.

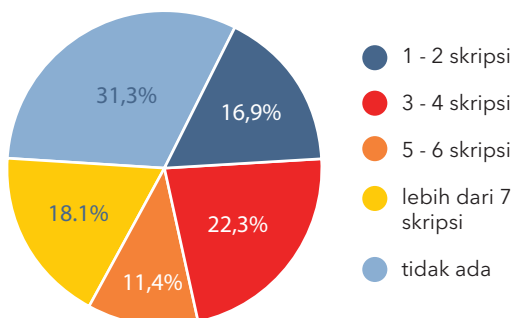
**GAMBAR 1. JUMLAH MAHASISWA YANG TERLIBAT DALAM PENELITIAN TENTANG ISU GEDSI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR**



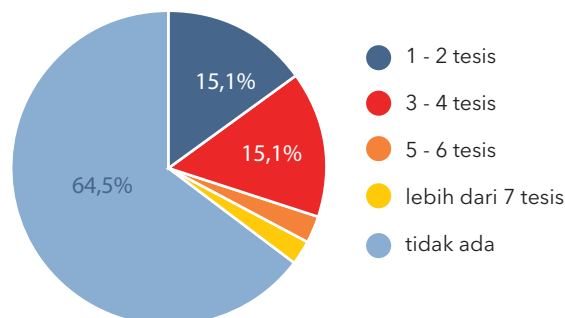
Bila dikaitkan dengan topik GEDSI pada skripsi, tesis, dan disertasi, tampak GEDSI belum diintegrasikan secara lebih terstruktur dalam penugasan ini. Dari jumlah skripsi yang dibimbing dosen dengan tema GEDSI, sebanyak 22,3 persen responden menyebutkan ada tiga-empat skripsi, sementara yang lebih dari tujuh skripsi tercatat sebanyak 18,1 persen. Data lebih lengkap tampak dalam Gambar 2.

Dari jumlah tesis yang dibimbing dosen dengan tema GEDSI, sebanyak 15,1 persen responden menjawab ada tiga-empat tesis. Porsi yang sama menyatakan ada satu-dua tesis yang dibimbing bertemakan GEDSI. Data lebih jelas terlihat dalam Gambar 3.

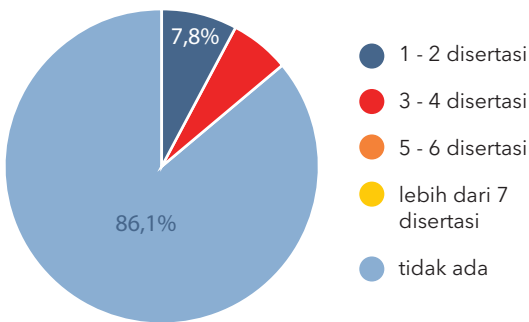
**GAMBAR 2. JUMLAH SKRIPSI YANG DIBIMBING DOSEN DENGAN TEMA GEDSI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR**



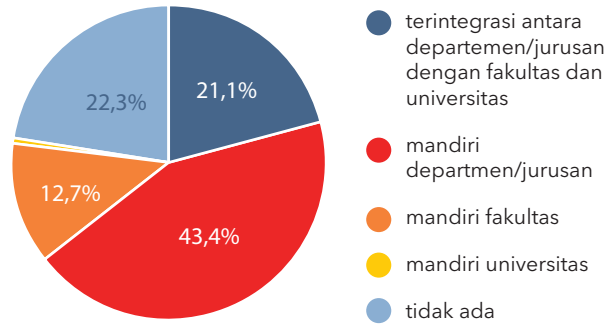
**GAMBAR 3. JUMLAH TESIS YANG DIBIMBING DOSEN DENGAN TEMA GEDSI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR**



**GAMBAR 4. JUMLAH DISERTASI YANG DIBIMBING DOSEN DENGAN TEMA GEDSI SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR**



**GAMBAR 5. PERSENTASE FORMAT MATA KULIAH TENTANG GEDSI YANG DITAWARKAN PERGURUAN TINGGI**

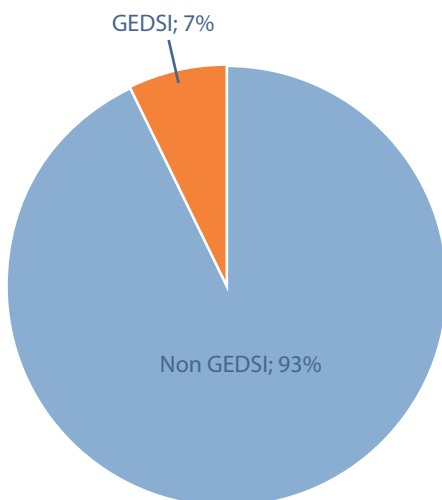


Sementara itu, jumlah disertasi yang dibimbing dosen dengan tema GEDSI baru tercatat sebanyak 13,9 persen. Dari persentase tersebut, yang paling dominan adalah satu-dua disertasi, yaitu sebanyak 7,8 persen. Data lebih jelas terlihat dalam Gambar 4.

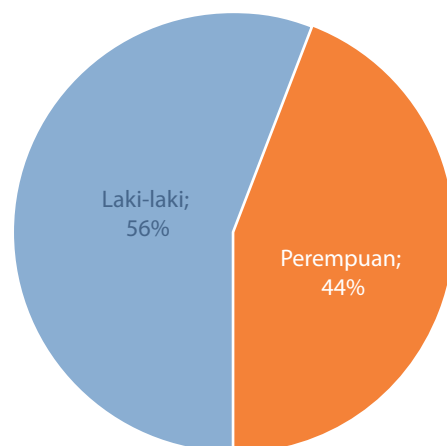
Mengenai format mata kuliah tentang GEDSI di perguruan tinggi, ada 21,1 persen responden yang menjawab bahwa mata kuliah tentang GEDSI diintegrasikan departemen atau jurusan dengan fakultas dan universitas. Namun, ada 43,4 persen responden yang menjawab bahwa penentuan mata kuliah GEDSI dilakukan secara mandiri oleh departemen atau jurusan. Perinciannya ada dalam Gambar 5.

Jumlah judul penelitian GEDSI yang didanai Kemenristekdikti pada 2013-2017 hanya 5.182 (7 persen) dari total 73.695 judul. Dari 5.182 judul penelitian GEDSI, subyek penelitiannya antara lain perempuan/gender (2,7 persen), anak dan anak kebutuhan khusus (2,4 persen), difabel (0,3 persen), orang lanjut usia (0,2 persen), dan petani/nelayan (1,4 persen). Dari jumlah penerima dana hibah penelitian menurut jenis kelamin, tampak secara total jumlah perempuan yang menerima dana masih lebih rendah daripada laki-laki, yaitu sebanyak 32.313 judul penelitian diketuai perempuan (44 persen) dan 42.382 judul (56 persen) diketuai laki-laki.

**GAMBAR 6. PERSENTASE JUDUL PENELITIAN GEDSI PADA 2013-2017 YANG DIDANAI KEMENRISTEKDIKTI**

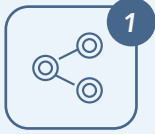


**GAMBAR 7. PERSENTASE JENIS KELAMIN PENELITI PENERIMA HIBAH KEMENRISTEKDIKTI PADA 2013-2017**





## REKOMENDASI



### 1 Kolaborasi dan Integrasi antara Pemerintah dan Universitas dalam Penguatan GEDSI

Dana pendamping (*matching fund*) melalui Kemendikbudristek untuk penciptaan kolaborasi serta sinergi strategis antara insan pendidikan tinggi (lembaga perguruan tinggi) dan pihak industri.



### 2 Mewujudkan Kampus yang Responsif GEDSI

Kampus yang responsif GEDSI bisa dicapai dengan pengintegrasian isu GEDSI dalam tata kelola pendidikan tinggi yang masuk atau diarusutamakan dalam kebijakan yang jelas, baik dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, penganggaran, maupun manajemen. Diperlukan komitmen tinggi dari para pengambil kebijakan untuk mendukung integrasi isu GEDSI dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

GEDSI mendesak untuk diintegrasikan dalam program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” serta secara khusus dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Focal point* GEDSI di kampus, baik secara personal maupun kelembagaan, menjadi sangat relevan dalam upaya akselerasi implementasi peraturan tersebut.

Selain itu, perlu penyediaan sarana dan prasarana yang berperspektif GEDSI, seperti tempat penitipan anak, ruang laktasi, lembaga pendidikan untuk anak usia dini dan taman kanak-kanak, pelayanan/perlindungan perempuan, serta sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan program beasiswa Bidikmisi dan program afirmasi, dibutuhkan kebijakan yang inklusif di kampus, seperti di bawah ini.

- Pemberian kuota khusus dengan seleksi masuk khusus (Seleksi Mandiri Penyandang Disabilitas atau SMPD, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas);
- Pemberian pelatihan kepada sukarelawan pendamping mahasiswa difabel;
- Penyediaan prasarana jalan, kursi roda, sepeda motor, dan tempat parkir khusus untuk difabel;
- Keberadaan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) sebagai pengelola.



### 3 Dosen yang Responsif GEDSI

Dalam praktiknya, isu GEDSI (khususnya ibu dan anak) sudah relatif lama diperkenalkan di perguruan tinggi, tetapi gerakannya belum signifikan karena rendahnya komitmen perguruan tinggi. Isu GEDSI diinisiasi dan dikawal oleh *focal point* yang berasal dari (1) staf yang aktif dalam kelompok/pusat studi wanita/gender/anak yang ada di perguruan tinggi, (2) dosen yang mengambil program S-2/S-3 yang terkait dengan isu GEDSI, dan (3) dosen/peneliti yang dilibatkan dalam suatu penelitian kolaboratif.



## REKOMENDASI

Isu GEDSI sudah menjadi fokus riset dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi kendati jumlahnya belum menggembirakan. Selain itu, isu GEDSI lebih banyak diteliti dosen perempuan daripada laki-laki dan paling banyak dari fakultas non-eksakta. Peneliti perempuan masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki, tetapi memiliki kapasitas yang sama. Perlu dukungan pusat penelitian gender untuk menyebarluaskan isu GEDSI ke semua dosen lintas fakultas. Selain itu, keberhasilan pemimpin dan guru besar (profesor) perempuan dapat menjadi rujukan.



4

### Mahasiswa yang Responsif GEDSI

Isu GEDSI bisa menjadi arus utama di kalangan mahasiswa dengan arahan dosen ataupun pimpinan fakultas dalam penyusunan tugas akhir. Isu GEDSI pada mahasiswa bisa bersumber dari (1) mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi dan/atau fakultas/program studi, (2) keterlibatan dengan penelitian dosen melalui program hibah Kemendikbudristek di semua skema karena pelibatan mahasiswa menjadi syarat dan nilai tambah dalam seleksi proposal, (3) seminar dan lokakarya yang diikuti mahasiswa, baik merupakan keharusan maupun tidak, serta (4) magang dan/atau praktik lapangan di lembaga/pusat studi yang berkonsentrasi pada isu GEDSI.

Perlu ada kebijakan afirmasi yang mendorong keterlibatan mahasiswa perempuan dalam lembaga kemahasiswaan serta mendorong lembaga kemahasiswaan menjadi institusi yang ramah kepada perempuan dan penyandang disabilitas.



5

### Kurikulum yang Responsif GEDSI

Dalam struktur mata kuliah, topik GEDSI bisa masuk mata kuliah mulai level awal sampai tahap akhir. Misalnya, GEDSI bisa masuk sebagai pokok bahasan dalam mata kuliah ilmu alam dasar, ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, teori sosiologi klasik, dan dasar-dasar statistik, atau dalam metodologi penelitian, atau dalam kuliah kerja nyata (KKN) tematik, dan/atau dalam tugas akhir berupa skripsi/tesis/disertasi.



6

### Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Responsif GEDSI

Buku panduan hibah Kemendikbudristek sejak edisi XII (2018) hingga edisi XIII Revisi (2021) telah mengarusutamakan aspek GEDSI, tetapi upaya ini perlu diikuti dengan kebijakan dan penyiapan *reviewer* proposal yang peka GEDSI. Pengarusutamaan GEDSI dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dikawal melalui kebijakan hibah Kemendikbudristek dengan skema antara lain (a) kompetisi dalam semua skema, baik nasional maupun desentralisasi, (b) penugasan, dan (c) riset invitasi.

Penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan tema interdisipliner atau interseksional dengan aspek lainnya, sehingga sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk memformulasikan desain penelitian dan menyasar hibah kompetitif untuk topik GEDSI. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi peneliti dalam metode penelitian perspektif kritis seperti *participatory action research* dari perspektif GEDSI.